



INDEKS BERITA ■ ■ ■

4

Rekomendasi
BAMUSTANI kepada
Pemerintah

10

Mengenal Kampung
Reforma Agraria SPI
di Langkat,
Sumatera Utara

12

Panen Padi Naik
2 kali Lipat, SPI
Lampung Fokus
ke Agroekologi



"Agroekologi mampu memutus ketergantungan petani kepada input kimia dari perusahaan"

Sarijo

Ketua SPI Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Hak Asasi Petani: Dasar Pelaksanaan Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan Indonesia



FOTO. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih (kedua dari kanan) memberikan dokumen kepada Menteri Desa Marwan Djafar dalam acara bertajuk Hak Asasi Petani di Jakarta, April 2016.

Hak Asasi Petani: Dasar Pelaksanaan Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan Indonesia



Foto: Petani pulang setelah selesai bertani.

Menyongsong Peringatan Hari Hak Asasi Petani Indonesia tahun 2016

JAKARTA. Upaya pemenuhan Hak Asasi Petani [1] di Indonesia dipercepat dengan sahnya UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan). UU ini disambut baik, lalu semakin dimajukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI—terkhusus dalam persoalan hak atas tanah untuk petani; serta topik mengenai kelembagaan petani.

Perjuangan untuk pemajuan dan pembelaan Hak Asasi Petani juga dilakukan melalui mekanisme hak asasi universal di Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang—mungkin dalam waktu dekat ini—akan melahirkan Deklarasi PBB untuk Hak Asasi Petani dan Masyarakat Pedesaan.

“Walaupun instrumen hukum Hak Asasi Petani telah tersedia, namun kebijakan terkait mengenai agraria, pedesaan, pertanian dan pangan, belumlah terimplementasi secara utuh,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta siang ini (19/04).

Ia melanjutkan, “buktnya, petani dan organisasi tani belum dilibatkan dalam implementasi reforma agraria—melalui redistribusi tanah pertanian. Begitu pun dengan implementasi program kedaulatan pangan, seperti desa berdaulat benih dan desa organik.”

Senada dengan hal tersebut, peran kelembagaan petani yang didirikan sendiri oleh petani termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dalam rantai kedaulatan pangan (produksi, distribusi, cadangan pangan dan konsumsi) masih sangat lemah. Tak mengherankan jika dalam mengatasi gejolak harga pangan—yang diduga dimainkan oleh para spekulan pangan—pemerintah masih bergantung pada pasar: kebijakan impor pangan masih jadi solusi jangka pendek.



Foto: Petani perempuan mengolah lahannya.

Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) menyarankan, “Pemerintahan Joko Widodo perlu merumuskan langkah teknis dan dukungan, pemikiran dan tindakan bersama organisasi tani.”

Agusdin Pulungan dari Wahana Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) menyambung, “Dukungan pemikiran dari organisasi tani kami wujudkan melalui Musyawarah Petani. Ini sesuai mandat UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.”

“Untuk itulah kami, empat organisasi tani yang tergabung didalam Badan Musyawarah Tani Indonesia—disingkat BAMUSTANI [2] —menyelenggarakan Musyawarah Tani. Tujuannya bekerja dan mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian konflik tanah dan merealisasikan redistribusi tanah kepada petani,” ujar Kustiwa Adinata dari Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI).

Misi BAMUSTANI adalah bersama mewujudkan reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan—dua cita-cita kaum tani yang sudah diamanatkan Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jika hak asasi petani sebagai dasar perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan sepenuh hati, maka reforma agraria dan kedaulatan pangan bisa tercapai.

Pada peringatan Hari Hak Asasi Petani Indonesia tahun 2016, BAMUSTANI sebagai wadah perjuangan petani Indonesia akan menyelenggarakan Musyawarah Tani di Gedung Juang Jakarta pada tanggal 21 April 2016.

Acara ini akan memperkuat kebijakan pemerintah dengan pembahasan satu hari bersama petani, pejuang hak asasi, ahli pertanian dan desa dan proponen kedaulatan pangan. Tema-tema yang akan menjadi matriks perlindungan dan pemenuhan hak asasi petani adalah:

1. Perlindungan kawasan pedesaan dan tanah pertanian serta redistribusi tanah bagi petani;
2. Kemandirian benih melalui perlindungan petani pemulia tanaman;
3. Penguatan peran kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) – Koperasi Petani; dan
4. Rantai Kedaulatan Pangan (produksi, distribusi, cadangan pangan dan konsumsi)

Melalui kegiatan Musyawarah Tani ini, petani terus berusaha konsisten dalam memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi petani.*****

Catatan:

[1] Lima belas tahun lalu, pada 18-20 April 2001, Organisasi petani dan masyarakat sipil menyelenggarakan Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Asasi Petani di Cibubur, Jawa Barat. Konferensi ini melahirkan Deklarasi Hak Asasi Petani. Konferensi ini juga menetapkan 20 April sebagai Hari Hak Asasi Petani Indonesia. Sejak saat inilah tema “hak asasi petani” menjadi salah satu tema sentral tuntutan petani di nusantara.

[2] BAMUSTANI terdiri dari organisasi petani yang terus memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan pangan sejak berdiri: Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) dan Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI)

WUJUDKAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI

Rekomendasi BAMUSTANI kepada Pemerintah, Terkait Petani, Pangan, Pertanian, & Perdesaan



Foto bersama peserta perhelatan BAMUSTANI di Jakarta, 21 April 2016

JAKARTA. Badan Musyawarah Tani Indonesia (Bamustani) yang terdiri atas Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) dan Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) mengeluarkan resolusi dan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-JK. Resolusi dan rekomendasi ini adalah hasil yang didapatkan dari Musyawarah Tani BAMUSTANI yang dilaksanakan di Jakarta, 21 April 2016.

Ketua Presidium BAMUSTANI Henry Saragih menyampaikan, secara keseluruhan acara musyawarah tani BAMUSTANI berhasil menghasilkan resolusi dan rekomendasi yang disarikan dari permasalahan yang dihadapi oleh petani kecil setiap harinya.

"Alhamdulillah acara musyawarah tani BAMUSTANI yang dilaksanakan dalam semangat Hari Hak Asasi Petani Indonesia ke-15 20 April 2016 mampu mengakomodir semua permasalahan petani kecil di perdesaan, mulai dari akses lahan, benih, kelembagaan petani, berdaulat pangan, hingga penegakan hak asasi petani," kata Henry di Palembang, Sumatera Selatan (25/04).

Penguatan Mata Rantai Kedaulatan Pangan

Muhammad Nurudin dari API memaparkan, swasembada dan kedaulatan pangan tidak akan tercapai jika kesejahteraan dan perlindungan petani dan pemenuhan hak-hak petani tidak terpenuhi. Oleh karena itu musyawarah tani BAMUSTANI menuntut pemerintah segera melakukan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU No 19. tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"BAMUSTANI merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan skala usaha petani penghasil pangan dengan redistribusi tanah kepada petani-petani kecil sebagai produsen pangan dan memberikan perlindungan lahan pangan berkelanjutan," katanya.

TOLAK PERAMPASAN LAHAN!!!



Foto: Situasi musyawarah BAMUSTANI di Jakarta, 21 April 2016.

“Pemerintah harus memperkuat organisasi petani (kelompok tani, atau organisasi petani bentuk lainnya) dan atau koperasi-koperasi petani dalam rangka memperkuat sistem tataniaga pangan di tingkat desa, kabupaten, dan nasional,” lanjutnya.

“BAMUSTANI mendesak pemerintah unyuk mempercepat penetapan badan pangan dan atau badan otoritas pangan sebagaimana mandat UU No. 18/2012 tentang pangan. Pemerintah harus mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi langsung kepada petani untuk memperkuat kemandirian petani atas kebutuhan pupuk, dan mekanismenya di didasarkan kepada musyawarah petani,” lanjutnya lagi.

“Pemerintah harus membangun sistem tataniaga pangan dan distribusi pangan yang melindungi petani pangan dan mempersempit disparitas/kesenjangan harga pangan di tingkat petani dan konsumen. Pemerintah wajib memperkuat SDM petani melalui pemberdayaan kelompok tani, koperasi petani maupun organisasi petani bentuk lainnya. Pemerintah wajib menolak impor pangan dan mengurangi ketergantungan pangan impor karena merugikan petani pangan di Indonesia,” paparnya.

“Pemerintah juga harus membangun lembaga pembiayaan petani untuk memperkuat akses modal bagi petani dan koperasi petani,” tambahnya.

Rekomendasi Tentang Benih dan Pupuk

Selanjutnya, Agusdin Pulungan dari WAMTI mengemukakan, BAMUSTANI berusaha untuk senantiasa mendorong pemberlakuan suatu sistem pengembangan pertanian yang berkeadilan terutama bagi petani kecil yang selama ini berada di rantai ketidakadilan. Dalam konteks menjawab permasalahan terkait yang selama ini muncul maka BAMUSTANI merekomendasikan agar subsidi ditingkatkan dengan merubah pola bantuan yang mengedepankan petani sebagai subyek utama penerima keuntungan.

“Petani penangkar benih ataupun pemulia difasilitasi untuk lebih berkembang termasuk legalitas dan distribusi produksi benih. Pengawasan bantuan benih dan pupuk ditingkatkan supaya subsidi tepat sasaran,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, BAMUSTANI juga merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan benih-benih varietas yang sesuai dengan ancaman banjir, kekeringan dan umur lebih pendek; standar dan pola pengawasan oleh BPSB juga harus lebih diperketat untuk mengurangi benih berlabel yang rendah kualitasnya,” jelasnya.

Selanjutnya, Agusdin menekankan agar rekomendasi aplikasi pupuk dan penggunaan benih tidak bersifat seragam tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal.

“BAMUSTANI juga merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi produksi (gabah) kepada petani, serta pengadaan saprodi (benih/pupuk) secara langsung dan tidak melalui pihak ke tiga,” ungkapnya.

Penguatan Peran Kelembagaan Petani & Badan Usaha Milik Petani (BUMP) – Koperasi Petani

Kustiwa Adinata dari IPPHTI meneruskan, organisasi dan lembaga tani menuntut payung hukum untuk lembaga dan organisasi di luar poktan dan gapoktan yang jelas-jelas tidak dimasukkan dalam Draft Revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menjadi Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

“Perlu adanya pengakuan struktur organisasi lembaga/organisasi petani di luar poktan dan gapoktan. Pemerintah dan Pemda juga harus

Sambungan dari hal. 5



Foto: Seorang petani SPI di Bogor sedang menyiram lahannya di tengah menjulangannya bangunan tinggi, menggosok lahan petani.

memfasilitasi penyuluhan, pendampingan, pertukaran petani (studi banding) untuk lembaga atau organisasi petani di luar poktan dan gapoktan," katanya.

"Musyawarah petani harus dilakukan dengan melibatkan lembaga/organisasi petani di luar poktan dan gapoktan dalam perencanaan perlindungan lahan pertanian sebagaimana mandat Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pemerintah dan Pemda dapat menyediakan informasi dan mempermudah lembaga atau organisasi petani di luar poktan dan gapoktan terkait bantuan sarana produksi pertanian; Pemerintah dan Pemda juga harus memberikan bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa dan asuransi pertanian kepada lembaga/organisasi petani di luar poktan dan gapoktan," paparnya.

Kustiwa melanjutkan, pemerintah dan Pemda juga harus memfasilitasi penyuluhan, pendampingan, pertukaran petani (studi banding) untuk lembaga/organisasi petani di luar poktan dan gapoktan.

Dalam hal akses permodalan: pemerintah dan Pemda juga harus memberikan akses ke perbankan dan kemitraan kepada lembaga/organisasi petani di luar poktan dan gapoktan.

"Serta harus ada kepastian usaha melalui perlindungan pemasaran, keringanan PBB lahan pertanian, penghapusan biaya tinggi," ungkapnya.

Perlindungan Tanah Pertanian & Redistribusi Tanah Bagi Petani

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI menyampaikan, melalui Musyawarah Tani organisasi tani yang tergabung dalam BAMUSTANI merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera menjalankan mandat UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Pelaksananya, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa secara sungguh-sungguh

"BAMUSTANI merekomendasikan agar Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang reforma agraria sebagai peraturan pelaksana terhadap redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria dengan prinsip keadilan bagi petani Indonesia," tegasnya.

"Agar pemerintah menjalankan reforma agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden RI agar bisa menjangkau ke tingkat bawah, bersifat operasional, serta dapat mengambil keputusan secara cepat, bukan hanya sekedar koordinasi yang menghasilkan rekomendasi," lanjutnya.

Agus Ruli menambahkan, BAMUSTANI juga merekomendasikan agar pemerintah mengakui dan melibatkan organisasi tani dan menempatkan petani sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan pedesaan dan pelaksanaan reforma agraria, guna menjamin dan pemenuhan hak-hak petani Indonesia.

"Masih dalam semangat Hari Hak Asasi Petani Indonesia, musyawarah tani BAMUSTANI ini akan diikuti dengan pelatihan hak asasi petani se-Asia Tenggara dan Asia Timur oleh La Via Campesina dan SPI (26-28 April 2016), yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Desa Marwan Djafar," tutupnya.



LEMBARAN KHUSUS

campesinos

KABAR INTERNASIONAL

PEMBARUAN TANI
EDISI 148
JUNI 2016

7

Petani Menyusun Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani & Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan



(Kiri-Kanan) Dirjen Kementerian Desa Ahmad Erani Y - Menteri Desa Mrawan Djafar - Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam acara pelatihan dan rapat La Via Campesina tentang Hak Asasi Petani

Siaran Pers Serikat Petani Indonesia (SPI), Regional Consultation, Training & Meeting of LVC Collectives Rights of Peasants & Other People Working in Rural Areas

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) dan La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Regional, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Hak Asasi Petani di Wisma PKBI Jakarta, 26-29 April 2016.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, Hak Asasi Petani yang dideklarasikan pada 20 April 2001 di Cibubur-Jawa Barat, dalam waktu dekat ini akan menjadi sebuah deklarasi universal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Bulan depan (Mei) kita akan rembuk bersama Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengenai pemutakhiran draft Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan,” kata Henry di Jakarta (26/04).

Henry Saragih melanjutkan, acara ini bertujuan untuk memberikan masukan yang berbobot ke draft PBB tentang Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Daerah Pedesaan — dengan kata beberapa kata kunci yakni hak atas tanah dan teritori, hak atas benih dan

Bersambung ke hal. 8

Sambungan dari hal. 7



Foto: Suasana acara pelatihan dan rapat La Via Campesina tentang hak asasi petani di Jakarta.

pengetahuan serta praktek pertanian tradisional, hak atas keragaman hayati, dan adanya kewajiban negara untuk mendukung dan menegakkan hak-hak tersebut.

“Acara ini juga bertujuan untuk membangun kapasitas peserta untuk mengetahui proses yang terjadi di PBB, selanjutnya bekerja di level nasional, bekerjasama dalam membuat laporan regional tentang pelanggaran hak asasi petani, meresponsnya, hingga menyelesaikannya. Yang tak kalah penting adalah acara ini akan memutuskan tindak lanjut di level regional dan nasional selama dua tahun ke depan,” jelas Henry yang juga anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina Asia Tenggara dan Asia Timur.

Hadir pada acara ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Marwan Ja’far sebagai keynote speaker. Di depan 100 peserta perwakilan dari petani Indonesia, negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, beliau menyatakan, “untuk pemenuhan Hak Asasi Petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, kami akan mendorong desa agar mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam termasuk tanah-tanah pertanian subur—reforma agraria—kalau kata petani”.

Untuk perjalanan kaum tani dan masyarakat desa mencapai Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan masyarakat pedesaan, Menteri Desa mengucapkan selamat dan berharap agar cepat terwujud.

“Hal ini sudah ada di Nawa Cita dan program Kementerian Desa, mari bersama-sama dengan pemerintah: organisasi tani, masyarakat sipil, petani, nelayan, perempuan, kaum muda, mewujudkan dan melindungi serta memberdayakan petani dan masyarakat desa,” tambah Marwan di Jakarta, tadi pagi (26/04).

Sementara itu, Bonanza Perwira Taihito, dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan, SPI dan Kementerian Luar Negeri RI selalu secara intensif melakukan komunikasi terkait perkembangan dan kemajuan dari proses deklarasi Hak Asasi Petani di PBB. Terlebih persiapan untuk rapat di Dewan HAM PBB pada Mei ini.

“Ini praktik yang baik, yang harus kita lakukan juga di banyak negara-negara lain: masyarakat sipil bekerja sama dengan pemerintah,” ujarnya.

Pada sesi yang sama, Direktur Yayasan Bina Desa Dwi Astuti menekankan untuk tidak melupakan petani perempuan.

“Petani perempuan seringkali menjadi korban paling parah dalam diskriminasi terhadap petani. Padahal petani perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam proses produksi pangan, keterlibatan petani perempuan menjadi salah satu isu penting yang harus diformulasikan dalam segala aspek perlindungan petani,” paparnya.

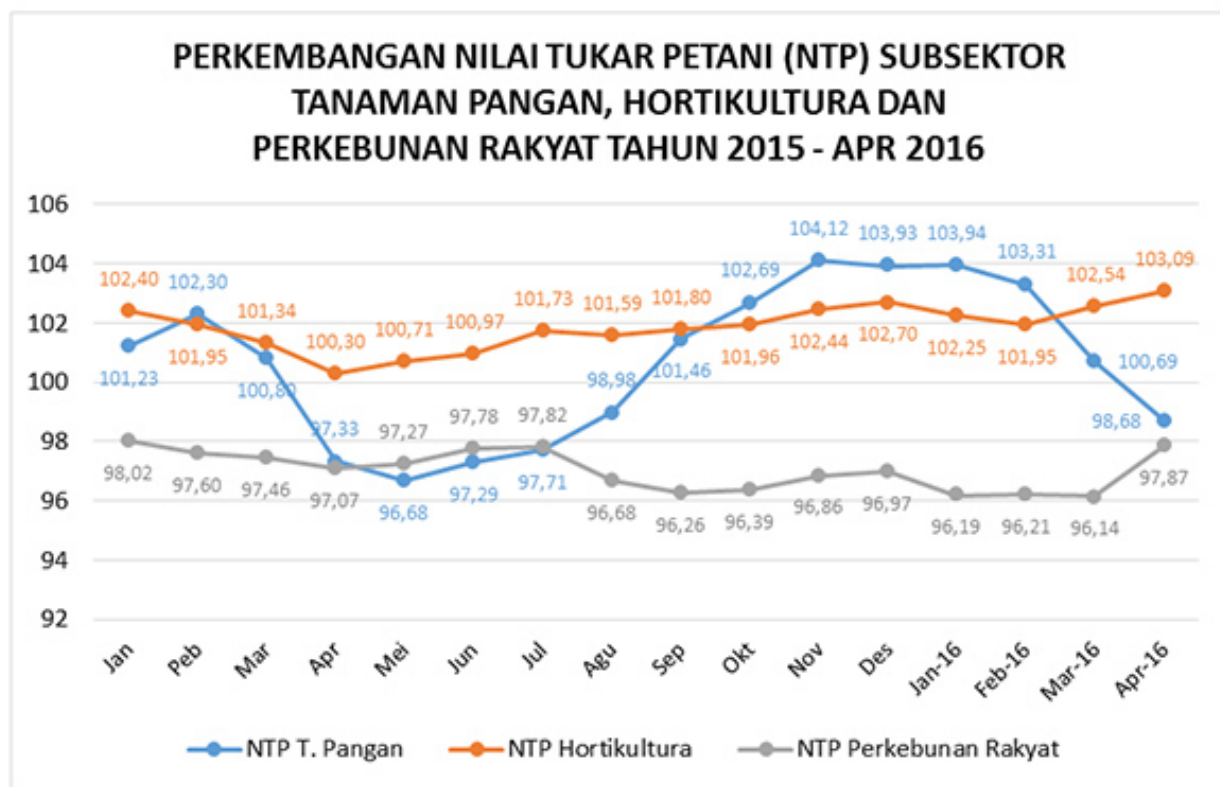
Hadir melalui video, Nardi Suxo Iturry, Duta Besar Bolivia — dan juga Chair rapporteur untuk Intergovernmental Working Group yang membahas Draft Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan. Ia menyatakan bahwa deklarasi ini adalah kemenangan petani.

“Kenapa kemenangan? Karena inisiatif dan perjuangan dari masyarakat sipil telah berhasil meyakinkan negara-negara untuk mengadopsi deklarasi yang melindungi petani dan orang yang bekerja di pedesaan,” imbuhnya.

Karena pentingnya pemenuhan Hak Asasi Petani, hasil dari pelatihan Hak Asasi Petani ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pertemuan-pertemuan Dewan HAM PBB dan Intergovernmental Working Group.

“Harapan petani, deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan segera disahkan. Dengan ini, perlindungan dan pemberdayaan petani akan semakin nyata di seluruh dunia,” tutup Henry Saragih. *****

Nilai Tukar Petani (NTP) April 2016 Turun, Pemerintah Didesak Keluarkan Kebijakan Harga, Produksi & Kelembagaan



Sumber: BPS, diolah SPI

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2016 mengalami penurunan 0,10 persen dari 101,32 pada bulan Maret menjadi menjadi 101,22. Hal ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,51 persen. Penurunan NTP terus terjadi sejak bulan November 2015 hingga April 2016.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 2 Mei 2016, NTP tanaman pangan mengalami penurunan yang drastis yakni sebesar 2 persen dari 100,69 di bulan Maret menjadi 98,68 pada bulan April. Sebagian besar penurunan dialami oleh kelompok petani padi dan jagung. Pada posisi ini NTP tanaman pangan lebih parah dibanding Agustus 2015.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, NTP tanaman pangan turun karena panen raya sedang berlangsung, kemudian datang hujan, petani cepat-cepat menjual padinya karena banyak petani kini tidak memiliki gudang untuk menyimpan hasil panen.

"Akibatnya harga gabah dan beras petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan. Padahal jika koperasi ada, petani dapat menyimpan hasil panen di gudang dan pengering yang dimiliki koperasi," kata Henry di Jakarta (04/05).

Henry melanjutkan, penurunan NTP tanaman pangan harusnya tidak terjadi jika bisa dikendalikan oleh pemerintah.

"Disinilah pentingnya peran Bulog yang harus bekerjasama dengan koperasi-koperasi petani. Untuk itu Pemerintah harus segera mengeluarkan platform kebijakan pangan yang mengatur kerjasama Bulog dengan koperasi-koperasi petani," tegasnya.

"Kejadian ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, akibatnya petani banyak yang meninggalkan tanaman pangan ke tanaman hortikultura dan perkebunan," sambungnya.

Sementara itu, NTP hortikultura dan NTP perkebunan rakyat tengah mengalami kenaikan. NTP hortikultura naik sebesar 0,54 persen menjadi 103,09. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan kembali turun jika harga hortikultura tak dikontrol oleh pemerintah—seperti kejadian harga tomat murah beberapa waktu yang lalu.

Di tengah tren negatif sejak tahun lalu, NTP Perkebunan Rakyat pada April 2016 mengalami kenaikan menjadi 97,87. Namun kenaikan itu tidak begitu menggembirakan bagi petani, karena NTP Perkebunan Rakyat masih berada dibawah 100—dimana indeks yang diterima petani sama dengan indeks yang dibeli petani. Dengan kata lain petani perkebunan rakyat masih mengalami kerugian.

"Karena itu SPI berpendapat, pemerintah harus memiliki kebijakan harga, produksi dan kelembagaan. Sehingga harga dan produksi dapat ditentukan misalnya batas minimum-maksimum, agar harga terjamin dan over supply tak lagi terjadi," tutur Henry.

Henry menambahkan, terkait kebijakan kelembagaan, pemerintah didesak kembali menggunakan koperasi-koperasi petani sebagai elemen yang memiliki andil besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

"Ketiganya (harga, produksi dan kelembagaan) digulirkan dalam satu kerangka kebijakan, karena jika salah satu saja tidak terpenuhi maka perubahan belum tercapai", tambahnya.#

Mengenal Kampung Reforma Agraria SPI di Desa Sei Litur, Langkat, Sumatera Utara



Petani perempuan SPI mengolah lahan untuk ditanami di kampung agraria di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Langkat, Sumatera Utara.

LANGKAT. Sudah lebih dari setahun diresmikan (26/01/2015), hari ini kampung reforma agraria petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), semakin berkembang.

Ketua SPI Basis Sei Litur Tasik Sainan menyampaikan, sejak diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Sumut alm. M. Roem, kampung reforma agraria ini sudah produktif menghasilkan ribuan ton pangan yang menopang kedaulatan pangan desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

"Ini kami baru aja panen ubi 300 ton, sayang harganya lagi turun, cuma Rp 600 per kg," kata Sainan di lahannya di Desa Sei Litur Tasik (09/04). Sainan menjelaskan, kampung reforma agraria ini memiliki luasan sekitar 203 hektar yang dimiliki bersama oleh sekitar 100-an KK.

"Lahan 203 hektar itu peruntukannya untuk perumahan, lahan kolektif untuk logistik organisasi, lahan untuk petani anggota SPI, hingga fasilitas umum seperti lapangan sepakbola, musholla, menyusul kantor pemerintahan desa," jelas Sainan.

Sainan melanjutkan, untuk tanaman pangannya, saat ini lahan ditanami dengan karet, ubi, pisang, jeruk, dan tanaman pangan lainnya.

"Kami udah berhenti menanam sawit karena bikin tanah kering dan tidak ramah lingkungan. Selain ubi, pisang, karet, sekarang kami mulai mencoba menanam kedelai," ujarnya.



Lokasi kampung reforma agraria di Sei Litur Tasik, Langkat

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Langkat Suryono. Ia menerangkan, bagi petani anggota SPI Desa Sei Litur Tasik yang belum memiliki tempat tinggal, organisasi juga menyediakan lokasi di kampung reforma agraria ini.

"Tentunya bentuk dan standar bangunan sudah kami tetapkan bersama dalam musyawarah," kata Suryono.

Suryono mengemukakan, kampung reforma agraria ini berdiri berkat kegigihan petani SPI memperjuangkan lahannya.

"Lahan ini dulunya berkonflik dengan PTPN II, tapi karena yang diperjuangkan petani memang benar dan kita petani bersatu berjuang, alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil," katanya.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah mengungkapkan, saat ini sudah terdapat dua buah kampung reforma agraria di Sumut, di Sei Litur Tasik di Langkat, dan di Bandar Pasir Mandoge, Asahan.

"Kita di SPI sudah membuktikan kalau reforma agraria mampu diterapkan dan berhasil meningkatkan ekonomi petani kecil, dan menegaskan kedaulatan pangan. Jadi reforma agraria yang kita perjuangkan bukan cuma manis di bibir saja," kata Zubaidah.

Oleh karena itu Zubaidah menambahkan, ia menunggu langkah nyata pemerintahan Jokowi-JK untuk segera melaksanakan reforma agraria yang sudah dijanjikan yang tertera dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019.

"Sudahlah Pak Jokowi, langsung jalankan reforma agraria, bagikan sembilan juta hektar lahan kepada petani kecil, buruh tani, petani penggarap, dan petani tak bertanah, agar petani kita sejahtera, pangan pun berdaulat. Sudah lebih setahun memerintah, tapi belum kelihatan aksi nyatanya," tambahnya.

"Jangan lupa gandeng ormas tani yang punya massa riil agar tanah objek reforma agraria benar-benar terdistribusikan kepada mereka yang layak," tutupnya.#



Diskusi di lahan Ketua SPI Langkat - Ketua SPI Sumatera Utara dan Sekretaris Umum DPP SPI di lahan di kampung reforma agraria.

Panen Padi Naik 2 kali Lipat, SPI Lampung Fokus ke Agroekologi



Foto: Ketua SPI Lampung (kiri) bersama dua orang petani SPI yang baru saja sukses panen padi dengan metode agroekologi

PRINGSEWU. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung saat ini memfokuskan diri untuk mengembangkan pertanian berbasis agroekologi.

Menurut penuturan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Lampung Muhlasin, pertanian agroekologi adalah pertanian alami yang ramah lingkungan yang mampu melepaskan petani dari ketergantungan terhadap input-input kimia dari perusahaan pertanian.

"Agroekologi ini dalam prakteknya memanfaatkan semua yang ada di sekitar petani dan dimanfaatkan untuk input pertanian, mulai dari pupuk, penangkal hama, penangkaran benih, dan lainnya," kata Muhlasin di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung (14/04).



Foto: Petani SPI Lampung mengolah lahannya.

Muhlasin menyampaikan metode agroekologi ini sudah diterapkan oleh para petani SPI di daerahnya.

“Dengan agroekologi ini panen pun melimpah. Terakhir kami panen padi 1,6 ton gabah kering di lahan seluas 2.000 m². Ini artinya hasil panen naik hampir 2 kali lipat, soalnya biasanya panen padi konvensional di sini itu 6 ton per hektar,” katanya.

“Padinya juga lebih kuat, soalnya padi konvensional yang pakai urea itu kan rapuh, kena hujan dan angin roboh. Alhamdulillah beberapa hari lalu, saat hujan mengguyur desa kami, padi yang ditanam dengan metode agroekologi ini bertahan, sedangkan padi konvensional roboh dan puso,” sambungnya.

Teknik Agroekologi untuk Padi

Muhlasin menjelaskan proses pengaplikasian agroekologi untuk padi ini dimulai sejak menyiapkan lahan. Saat lahan sedang dalam proses pembajakan, Muhlasin dan petani SPI lainnya sudah melakukan pemupukan ke lahan dengan menggunakan pupuk padat.

“Untuk lahan seluas 2.000 m² ini kira-kira dibutuhkan 300 kg bokashi,” jelasnya.

Selanjutnya saat penyemaian, benih padi disemprot dengan cairan PGPR yang dibuat dari racikan akar bambu, bonggol pisang, dan lainnya.

“PGPR ini kan bakteri yang mengumpulkan unsur N, P, dan K di alam bebas yang kemudian membawa unsur-unsur ini ke akar padi (tanaman) sehingga asupannya lebih banyak,” kata Muhlasin.

Muhlasin melanjutkan, saat akan melakukan penanaman, seluruh lahan kembali disemprot dengan PGPR.

“Untuk lahan seluas 2.000 m² kira-kira butuh 1 liter cairan PGPR, disemprot 15 hari sekali, sampai umur 45 hari,” lanjutnya.

Ia kembali menjelaskan, tanaman padi juga disemprot dengan larutan pupuk cair yang terbuat dari enceng gondok, johor laut, batang pisang, sampah rumah tangga, dan air kencing kelinci.

“Ini untuk menyuburkan tanahnya,” imbuhnya.

Muhlasin meneruskan, saat pemupukan akhir menggunakan kombinasi EM (Effective Microorganisms) dan kuning telur ayam kampung yang

Iklm Ekstrim, Petani NTT Bingung Bertani



Foto: Lahan yang mengalami kekeringan di Manggarai Timur.

MANGGARAI TIMUR. Perubahan iklim yang ekstrim tengah menghinggap seluruh dunia. Adapun dampak dari perubahan iklim antara lain kekeringan, badai pesisir, suhu meningkat dan naiknya permukaan air laut. Perubahan iklim ekstrim di Indonesia ini berdampak sulitnya memprediksi waktu musim hujan dan musim kemarau berlangsung.

Dampak perubahan iklim juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di daerah ini banyak terjadi keganjilan, misalnya dalam satu kabupaten salah satu daerah sudah turun hujan namun pada waktu yang bersamaan daerah lain masih kekeringan.

Sebastian Anggal anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) asal NTT menyampaikan, kekeringan panjang saat ini masih melanda NTT, di Kabupaten Manggarai Timur petani banyak yang mengalami gagal panen.

"Khusus di sekitar daerah pesisir, kekeringan menyebabkan jagung dan padi yang ditanam petani anggota SPI kekurangan air. Begitupun dengan kakao dan pisang yang tidak bisa berbuah," katanya saat dihubungi via telepon (12/05).

Namun hal sebaliknya terjadi pada petani anggota SPI di sekitar pegunungan NTT.

"Herannya, petani anggota SPI di pedalaman dan pegunungan Manggarai sudah turun hujan, alhasil kopi mereka sedang melimpah saat ini," imbuhnya.

"Kami petani jadi sedikit bingung untuk bertani, untuk memulai masa tanam, dan lainnya, karena iklim dan cuaca semakin susah diprediksi," sambung Sebastian.

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menanggapi, pemerintah mulai dari tingkat nasional hingga desa harus segera bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang sistematis, hingga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mensosialisasikan kondisi iklim dan cuaca di masing-masing daerah.

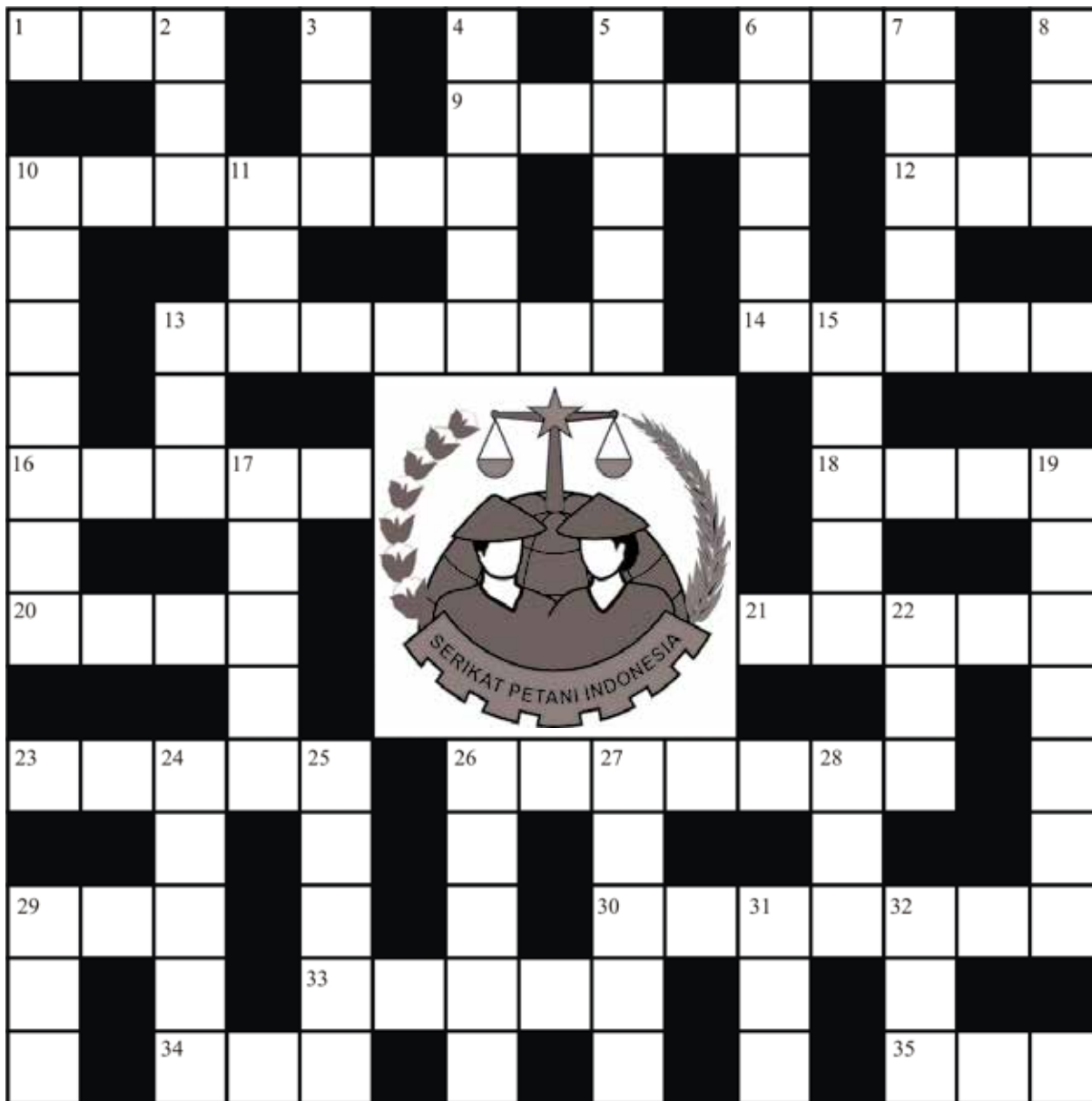
"Kalau pemerintah tidak cepat bertindak, petani akan terus mengalami kesulitan menentukan masa tanam dan komoditas yang ditanam," kata Agus Ruli.

Agus Ruli menyampaikan, pemerintah juga harus menggiatkan jenis pertanian yang ramah lingkungan, yang tidak berkontribusi terhadap gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan iklim ekstrim.

"Pertanian konvensional menggunakan kimia dan pertanian berbasis industri harus ditinggalkan. Mari hijrah ke pertanian agroekologi yang ramah lingkungan, membuat petani berdaulat benih dan negara berdaulat pangan," ungkapnya.

"Dari sisi produksi pertanian agroekologi juga mampu menaikkan hasil panen, dan tanamannya juga tahan banjir. Petani kita di Lampung sudah membuktikannya; ketika dilanda banjir, sawah yang ditanam menggunakan urea tumbang dan puso, sedangkan sawah yang ditanam menggunakan prinsip agroekologi alhamdulillah bertahan," tambahnya.#

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 066



MENDATAR

1. Tempat penyimpanan barang 6. Organisasi Buruh Internasional 9. Kepala pemerintahan tingkat terendah 10. Binatang mamalia bertelinga panjang 12. Kantor Berita Inggris 13. Senang, riang 14. Cepat, segera 16. Tokoh pujaan 18. Panggilan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini 20. Jalan kecil 21. ... Monica, artis dan penyanyi Indonesia 23. Tujuh (sansekerta) 26. Peralatan bertani 29. Badan Pertanahan Nasional 30. Pemancaran gelombang bertenaga melalui ruang dan zat antara 33. Zat cair yang warnanya seperti timah 34. Organisasi tani kebanggaan kita 35. Sejenis singkong

MENURUN

2. Sejenis sayuran 3. Pekan Olahraga Nasional 4. Bukti bahwa seseorang ada di tempat lain ketika peristiwa pidana terjadi 5. Karangan bebas 6. Perihal 7. Gerakan air laut turun naik 8. Tuberculosis 10. Hewan ternak 11. Gagasan 13. Awalan yang berarti Bumi 15. Kakek, nenek 17. Dialek 19. Tumbuhan yang mengeluarkan bau harum 22. Kosong 24. Sejenis pohon dataran tinggi 25. Menunggu di barisan 25. Mudah menguap pada temperatur yang relatif rendah 26. Terang 27. Terlalu berlebihan, kurang serasi 28. Singkong 29. Perkakas untuk membuat lubang 31. Meminta kepada Yang Maha Kuasa 32. Alat penumbuk tradisional

Sambungan dari hal. 13

sudah difermentasi.

“Ini fungsinya sebagai pupuk buah. Disemprotkan ke padi saat mulai meratak, yaaah kira-kira saat usia padinya sudah 50 hari, disemprotkan tiga kali, tujuh hari sekali, 1 liter untuk lahan seluas 2.000 m²” paparnya.

Pengendalian Hama

Muhlasin mengutarakan, jika ada hama yang mengganggu ia akan menggunakan cairan trichoderma yang juga dibuat secara alami.

“Nasi setengah matang yang sudah diendapkan atau dibiarkan selama semalam yang diletakkan di dalam bambu lalu ditanam di bawah pohon bambu atau pepohonan lainnya. Nah setelah seminggu akan muncul jamur berwarna hijau di nasinya, inilah trichoderma yang berfungsi sebagai parasit bagi jamur lainnya,” paparnya.

“Tapi ramuan trichoderma ini cuma diaplikasikan saat ada hama saja, kalau tidak ada atau tingkat hamanya di bawah lima persen ya tidak perlu,” lanjutnya.

Tekan Biaya

Muhlasin menambahkan, praktek agroekologi yang sudah dipraktikkannya dan petani SPI Lampung lainnya telah terbukti menekan biaya produksi.

“Yaah paling biaya paling besar itu untuk beli kotoran sapi untuk bokashi yang kira-kira Rp 50.000 untuk 300 kg untuk 2.000 m²,” tambahnya.

Selain itu, tambahannya lagi, semua bahan-bahan pupuk diambil dari lingkungan sekitar petani.

“Benih juga kita tangkarkan sendiri, dari petani ke petani. Dengan agroekologi kami berdaulat benih dan berdaulat pangan,” tutupnya. ###

Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

Musyawahar BAMUSTANI & Pelatihan Hak Asasi Petani se-Asia



FOTO. (Atas) Menteri Desa Marwan Djafar dan Ketua Umum SPI Henry Saragih (tengah) sedang dalam pembukaan konsultasi dan diskusi regional hak asasi petani yang diselenggarakan oleh La Via Campesina di Jakarta. (Foto berikutnya) Musyawarah Tani BAMUSTANI (Badan Musyawarah Tani) sekaligus peringatan Hari Hak Asasi Petani Nasional di Jakarta.